

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teoritis tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli Antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>9</sup>

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli Antropologi Perancis.<sup>10</sup> Untuk lebih jelasnya tentang pengertian kriminologi, beberapa sarjana telah memberikan beberapa definisi tentang kriminologi antara lain;

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>11</sup> Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek:

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001. Hal. 9

<sup>10</sup> A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal. 1

<sup>11</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *loc cit*.

- a. *kriminologi praktis*, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- b. *kriminologi teoritis*, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang meliputi:

- a. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Antropologi Kriminil merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.

- b. Sosiologi Kriminil.

Ialah ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi sosial*).

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*.

e. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.

f. Kriminologi Praktis

Ialah berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.

g. Kriminalistik

Ialah ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan, yaitu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland<sup>12</sup> merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 10

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidik faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha penendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdyo<sup>13</sup> memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Herman Manheim<sup>14</sup> mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 11

kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual.

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.<sup>15</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>16</sup>

Wood<sup>17</sup> berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011, hlm15

<sup>15</sup> Moeljatno. *Kriminologi(ii)*. Jakarta. Bina Aksara. 1986. hlm.3.

<sup>16</sup> Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. hlm. 20

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*. Hal12

J. Constant<sup>18</sup> mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Wolfgang, Savitz dan Johnston memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala macam aspek tentang kejahatan berupa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan maupun upaya penanggulangannya.

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu<sup>19</sup> :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi

- a) Definisi kejahatan
- b) Unsur-unsur kejahatan
- c) Relativitas pengertian kejahatan
- d) Statistik Kejahatan

---

<sup>18</sup> A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.2

<sup>19</sup> A.S Alam, *Ibid*. Hal 3

- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
  - a) Aliran-aliran kriminologi
  - b) Teori-teori kriminologi
  - c) Berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
  - a) Teori-teori penghukuman.
  - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitatif*.

### 3. Teori Causa dalam Kriminologi

Di dalam kriminologi, diketahui beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, ialah sebagai berikut:

- a. Teori klasik

Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa

senang dan rasa sakit. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas. Di mana dalam bertindak laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*).<sup>20</sup> Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

b. Teori Neo Klasik

Teori ini merupakan pembaharuan dari teori klasik, dengan demikian teori ini menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio untuk berkendak bebas dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Teori neo klasik meninggalkan hal yang supra natural sebagai prinsip untuk menjelaskan terbentuknya hukum pidana. Dengan demikian teori neo klasik menunjukkan permulaan yang naturalistik terhadap perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak sendiri

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.cit.* Hal 21.



yang bertindak berdasarkan intelegensia oleh karena itu harus bertanggung jawab terhadap kelakuannya.

c. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini sering pula disebut ajaran ajaran ekologis. Dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi soaial yang ada. Dengan kata lain kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

d. Teori Sosialis

Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab-akibat<sup>21</sup>. Maka untuk melawan kejahatan itu harus diadakan peningkatan dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

e. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut teori tipologis atau bio-typologis. Dalam teori ini terdapat beberapa pendapat yang membedakan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah:

f. Teori Lambroso/Mahzab Antrolpogis

Teori Lambroso menjelaskan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang sangat berbeda dengan manusia lainnya.

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.* Hal 29

g. Teori mental tester

Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membakar penjahat dan bukan penjahat. Teori mental tester memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan penyebab orang melakukan kejahatan.

h. Teori Psikatrik

Teori Psikiatrik merupakan lanjutan dari teori Lambroso. Namun demikian penekan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan.<sup>22</sup> Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologi, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

i. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan teori sosiologis merupakan aliran bervariasi yang banyak dipengaruhi oleh teori kartografis dan sosialis. Teori ini menafsirkan bahwa kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial. Inti dari ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal.30

berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

j. Teori Lingkungan

Teori ini juga bisa disebut sebagai mahzab Perancis. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.

#### 4. Teori penanggulangan dalam Kriminologi

Untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa cara untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu secara preventif dan represif. Maka yang dimaksud dari upaya tersebut ialah:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

*Crime prevention* dalam pelaksanaannya terdapat dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

- 1) Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

## 2) Metode untuk mencegah *the first crime*.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan secara preventif antara lain:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebut gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>24</sup>

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Dengan kata lain dalam upaya preventif ialah bagaimana masyarakat melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana masyarakat menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu

<sup>23</sup> Ramli Atmasamita. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung. PT Eresco. 1988. Hal.66

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 79

daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang yang mengarah kepada tindak kejahatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana khususnya pada kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa, “*social welfare*” dan “*social defense*”.<sup>25</sup>

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Uraianannya ialah sebagai berikut ini :

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.2007. Hal.77

a) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan yaitu: Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.<sup>26</sup>

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya

---

<sup>26</sup> Soedjono. *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Alumni 1970, hal. 34

atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

## B. Pengertian Anak

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Pengertian anak masih menimbulkan kesimpangsiuran pendapat para ahli hukum salah satu diantaranya adalah berapakah maksimal batas umur yang ditentukan bagi seorang anak dibawah umur. Mengenai batas umur anak dibawah umur tidak dapat ditentukan begitu saja, tetapi umumnya yang dimaksud anak dibawah umur adalah orang yang belum dewasa atau yang masih muda umurnya.

Mengingat pentingnya posisi anak dalam lingkungan masyarakat maka di sini terdapat berapa definisi tentang batasan usia anak menurut undang-undang yaitu :

---

<sup>28</sup> M. Nasir Djamil (ii), 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.8



1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi berusia 7 sampai 15 tahun.

Dari berbagai definisi tentang anak bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>29</sup>

Terdapat banyak sekali definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan mengenai siapakah yang disebut dengan "anak" ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang berbeda disesuaikan dengan sudut

---

<sup>29</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 41

pandangannya masing-masing. Namun dari berbagai definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan dua hal signifikan yaitu:

- 1) Batasan yang digunakan oleh masing-masing undang-undang untuk menentukan tentang anak ini, umumnya berdasarkan batasan umur.
- 2) Adanya ketidakseragaman definisi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam hal memaknai siapakah yang disebut anak tersebut. Ketidakseragaman tersebut dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan tujuan dan sasaran dari masing-masing undang-undang tersebut. Meskipun tidak dipungkiri, adanya perbedaan definisi ini akan menyulitkan para penegak hukum dalam memberlakukan hukum yang sesuai terhadap anak.

Kedudukan khusus anak dalam hukum, sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan hukum.

### **1. Hak-hak Anak**

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Di dalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain<sup>31</sup>:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat berupa:
  - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
  - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
  - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
  - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
  - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk mematuhi.
  - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
  - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.

---

<sup>31</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.35.

- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
  - 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri antara lain;
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
  - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak anak yang meliputi segala bentuk

pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*)

Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*).
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*).
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*).
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*).
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thoughts and religion*).
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights personality development*).
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).
- 8) Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health to physical development*).
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*).
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga

merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penaganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang-orang dewasa, memperoleh bantuan hukum



atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sendiri ada beberapa ajaran mengenai hak anak antara lain:

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alquran Surah Ath-Thalaq ayat (6).
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat (58-59).
- c. Hak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Hal ini berdasarkan Alquran Surah Al-Isra ayat (31).

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadist yang telah disebutkan di atas.
- g. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat (233).
- h. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasar kan hadist Riwayat Baihaqi.
- i. Hak untuk memperoleh agama berdasarkan Hadis Bukhari.

## **2. Kewajiban Anak**

Hak maupun kewajiban adalah suatu hal yang selalu beriringan. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilakukan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan antara lain<sup>32</sup>:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 19 UU No.23 Tahun 2002

### 3. Faktor Kriminogen terjadinya tindak pidana anak

Faktor kriminogen adalah adalah suatu faktor yang dapat menyebabkan atau menimbulkan terjadinya tindak pidana.<sup>33</sup> Faktor kriminogen ini dapat penulis contohkan seperti kasus salah satu anggota gang yang beranggota sekumpulan anak di bawah umur telah menjadi korban pemukulan oleh seorang anggota gang lainnya. Kemudian teman gangnya merasa tidak terima ketika salah seorang temannya dipukuli. Mereka akhirnya melakukan balas dendam dengan melakukan pengeroyokan, penganiayaan sampai membunuh terhadap pelaku yang memukuli temannya tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana) yang muncul saat orang yang dikeroyok tersebut telah sebelumnya melakukan pemukulan terhadap salah seorang anak di genk itu.

Anak yang masih dalam usia rentan, masih sering kali terjerumus dalam tindak pidana. Namun tanpa disadari bahwa banyak pengaruh yang mengakibatkan anak berani melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam diri anak yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan yang bila kita bentuk akan dapat melindungi anak dari resiko terjadinya tindak pidana.

---

<sup>33</sup> Antoni, *Kriminogenik dalam penegakan hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 55

#### 4. Anak Nakal

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2(dua) kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pada Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 telah mencampuradukkan dua pengertian, yakni<sup>35</sup>:

- a. “anak nakal” didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crimes actor; dader*).Perbuatan yang dapat dimintakan

<sup>34</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.2

<sup>35</sup> Naskah akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 13-14

pertanggung jawaban hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang.

- b. “anak nakal” didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*delequency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana (*straf baar feit: crimes*). Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terikat dengan asal legalitas.

Menurut penulis pada dasarnya anak memiliki kedudukan khusus di dalam hukum dalam artian ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap orang dewasa. Terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan. Kedudukan khusus anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

## **C. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah “tindak pidana” terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*” dalam hukum pidana Belanda lebih dikenal daripada istilah lain seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.<sup>37</sup>

Seperti yang telah diungkapkan oleh Moeljatno<sup>38</sup>, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana

---

<sup>36</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

<sup>37</sup> Adam Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya. PMN. Hal 15

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Azas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan perumpamaan.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan



segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>40</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

<sup>39</sup> Kartonegoro, Op Cit, hal 156

<sup>40</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Ha.1 193

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>41</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **D. Definisi Pencegahan**

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” serta akhiran “an”. “Cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan penolakan”.<sup>42</sup> Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Sedangkan pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan/penelitian epidemiologi. Dari kesimpulan di atas, Pencegahan merupakan melakukan suatu usaha agar sesuatu yang diprediksikan tidak akan terjadi ataupun kalau terjadi dalam skala yang kecil atau ringan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> KBBI 2007

Definisi dari pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Sebagian program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran.
- b. Desain untuk merubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
- c. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada.
- d. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah.
- e. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Untuk itu makna dari pencegahan ialah mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Oleh karenanya dalam kajian ini ditekankan bahwa pencegahan merupakan suatu bagian yang penting. Selain untuk meminimalisir suatu keadaan tapi juga untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang perlu diterapkan dalam

melakukan pencegahan itu sendiri yang dirasa nantinya dapat berguna bagi kepentingan di masa mendatang.

## **E. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

### **1. Sejarah berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

#### **Malang**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) terbentuk oleh karena pada tahun 1998 kondisi perempuan dan anak pasca kerusuhan massa sangat memprihatinkan. Para perempuan yang mengalami keadaan, shock atau trauma pasca kerusuhan tidak memiliki wadah untuk mengadukan nasibnya. Sehingga pada tahun 1999 melalui prakarsa Ibu Khofifah selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu bersama-sama LBH serta beberapa Organisasi Perempuan mendorong Polri untuk membentuk Ruang Pelayanan Khusus ( RPK / UPPA ) untuk melayani para korban tersebut. Dampaknya keberadaan Unit RPK/UPPA sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak pencari perlindungan dan keadilan, maka dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **2. Tujuan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UUPA) memiliki tujuan yakni:

- a. Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan /atau tersangka yang ditangani di UPPA.

- b. Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya.
- c. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan efek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

### **3. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

Sebagai gambaran umum bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki tugas pokok melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi bertugas/berperan sebagai pelindung dan penyidik, secara umum wewenangnya sama dengan penyidik. Tugas pokok dari UPPA tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, juga terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan.<sup>43</sup>

### **4. Kedudukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan suatu unit khusus yang menangani berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Unit ini bertugas sebagai unsur pelaksana pada Satuan Reserse Kriminal atau SatReskrim Polres. Jadi kedudukan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres kota Malang

---

<sup>43</sup> Lihat pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010

yaitu berada dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polres Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 6 (Enam) unit, yaitu unit yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum (Unit sidik I, Unit Sidik II, Unit Sidik III dan Unit Sidik IV) , unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Unit yang melakukan penyidikan tindak pidana yang secara langsung berada dilapangan (Unit sidik Opsnal. Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UPPA) Polres kabupaten Malang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan. Unsur pimpinan adalah kepala unit (Kanit) yang berpangkat serendah-rendahnya perwira pertama.

